

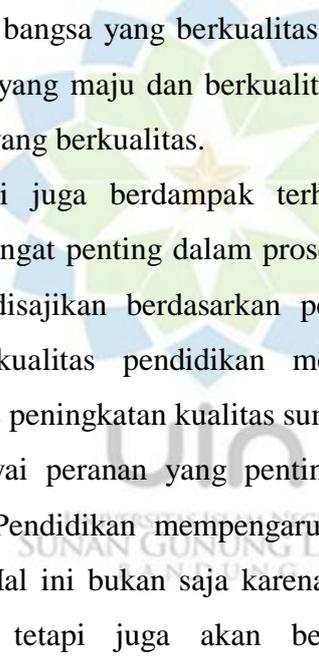
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat besar sebagai agen perubahan (*agent of change*), sekaligus untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan, agar siap memasuki era global yang penuh persaingan. Pemerintah serius dalam menangani bidang pendidikan sebab dengan pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas, unggul dan kompetitif. Untuk menciptakan pendidikan yang maju dan berkualitas diperlukan manajemen yang baik dan dukungan guru yang berkualitas.

Fenomena globalisasi juga berdampak terhadap pendidikan. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ini disajikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri.

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. “Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih bisa cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja (Fattah, 2017:1)”.


Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Mulyono, 2016:48)”.

Keterkaitan antara manajemen dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, dengan manajemen pada pendidikan akan mempermudah pengelolaan pendidikan tersebut, karena manajemen sebagai suatu disiplin keilmuan yang secara singkat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang memang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan pendidikan salah satunya pembiayaan madrasah. Mengingat pentingnya peran pembiayaan dalam proses pembelajaran. Maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola pembiayaan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut sebagai manajemen pembiayaan/keuangan. Terkait dengan pembiayaan pendidikan, banyak permasalahan muncul yang ditimbulkan dari penyalahgunaan realisasi anggaran yakni, minimnya anggaran pendidikan, penyimpangan dalam penyaluran dana pendidikan, banyaknya lembaga pendidikan yang kekurangan dana menjadi permasalahan bangsa yang tidak kunjung usai serta alokasi pendanaan yang belum memadai. Seperti halnya dikutip dari Darmaningtyas “alasan kritis yang menyebabkan alokasi dana pendidikan dialihkan untuk distribusi BBM juga menjadi persoalan tersendiri (Darmaningtyas, 2019:249)”.

Dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan baik bersifat kuantitatif dan kualitatif, “biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa dukungan biaya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan sesuai dengan harapan (Suherman, 2016:118)”.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. “Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. (Mulyasa, 2016:47)”.

Muhajirin (2018:171) menjelaskan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan mempunyai manfaat yang begitu besar bagi kelangsungan pembelajaran di sekolah atau madrasah, pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau

kegiatan program pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Gambaran tentang pengelolaan pembiayaan di sekolah tempat buat penelitian nanti sekilas bahwa keuangan disana tidaklah semuanya berpangku pada orangtua siswa, karena sekolah disana dibawah naungan pondok yang berdekatan dengan sekolah tersebut. Walaupun sarana prasarana kurang memadai tetapi sekolah berusaha agar tidak memberatkan beban biaya kepada orangtua siswa.

Tujuan pendidikan akan terlaksana dengan baik jika pembiayaan pendidikan sesuai dengan fasilitas yang tersedia di sekolah sehingga membuat kualitas atau mutu pendidikan tersebut semakin baik, sehingga para peserta didik akan nyaman dan puas, karena mereka tidak sia-sia mengeluarkan biaya sekolah untuk kepentingan mereka sendiri.

Konsep biaya dalam lembaga pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*), biaya langsung yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengejaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat pembalejaran, sarana prasarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu meliputi keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Fattah, 2017:23)

Aspek pembiayaan pendidikan itu sendiri terdiri dari dua aspek, yaitu aspek pemasukan dan aspek pengeluaran. Aspek pemasukan merupakan aspek pendapatan sekolah yang diperoleh setiap tahunnya dari berbagai sumber yang resmi dan diterima secara teratur. Aspek pengeluaran merupakan jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan disekolah atau madrasah,.

Factor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan diantaranya yaitu factor internal dan factor eksternal. Faktor internal merupakan factor yang ada dalam

naungan system pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, dan tingkat dan jenis pendidikan. Factor eksternal merupakan factor yang ada diluar system pendidikan yang meliputi berkembangnya demokrasi pendidikan, pebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan dan adanya inflasi (Yuliana, 2018:22)

Urgensi manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah atau madrasah berdasarkan perkembangan dunia dalam bidang pendidikan bahwa masalah manajemen pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Masalah tersebut menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Dan fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah atau madrasah yang memiliki imbas terhadap mutu pendidikan.

Dalam dunia pendidikan mutu juga merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan biaya pendidikan, karena baik buruknya kualitas atau mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh pengelolaan pembiayaan yang baik. Mutu sendiri diartikan “sebagai tingkat baik buruknya sesuatu kadar, derajat atau taraf mutu” (alwi, 2018:768). Mutu adalah “kemampuan dari suatu produk atau jasa dalam memuaskan pelanggan (Fattah, 2019:02)”.

Mutu di bidang pendidikan, meliputi: mutu input, proses, output dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pekam (pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan)

Sudrajad (2019:18) menjelaskan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memang memiliki kemampuan atau yang berkopetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal atau kompetensi sosial, serta nilai-nilai akhlah mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*). Lebih lanjut Sudrajad mengemukakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghaasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral yaitu mereka yang mampu

mengintegrasikan iman, ilmu dan amal. Pendidikan dikaitkan dengan tuntutan mutu pendidikan menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 (2013:1) menyatakan: Mutu pendidikan mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dalam jurnal yang diteliti oleh (Dedy Achmad Kurniady, 2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan atau disingkat SMK berada pada kategori yang tinggi, maksudnya kepala sekolah pada SMK sudah mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara maksimal dimulai dari perencanaan pembiayaan dan penganggaran, implementasi pembiayaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Manajemen pembiayaan pada SMK menggambarkan hasil rata-rata sebesar 4.65 yang berada pada kategori tinggi. Sedangkan mutu sekolah di SMK menghasilkan rata-rata 4.63 yang berada pada kategori sangat tinggi, khususnya mutu peserta didik sebesar 4.32. Hal ini berarti manajemen pembiayaan pendidikan memiliki pengaruh terhadap mutu sekolah menengah kejuruan. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyaknya angka putus sekolah tetapi kepala sekolah sudah berhasil serta mampu dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan sehingga mutu sekolah didalamnya pun baik. Adapun Masalah yang muncul dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan bahwa kepala madrasah harus mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara maksimal dimulai dari perencanaan pembiayaan dan penganggaran, implementasi pembiayaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas untuk membuat mutu pendidikan lebih baik.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kurniady, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, 2016) Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah SMP Pada sub-rayon 1 di Kabupaten Bandung

Barat, Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang cukup kuat antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan mutu sekolah. Secara individual, hubungan manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap mutu sekolah, yang mana kontribusi manajemen pembiayaan pendidikan yang secara langsung mempengaruhi mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat sebesar 24.5%, di mana terdapat 75.5% sisanya merupakan pengaruh dari factor lainnya. Dalam hal tersebut, pada tahap pelaksanaan pembiayaan sudah mencapai kategori sangat tinggi, dimana setiap kegiatan manajemen pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan yang disusun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Bandung, diperoleh informasi dari Bapak (Arifin, 2020) selaku bendahara di FKDT Se-Kabupaten Bandung didapat keterangan bahwa dalam melaksanakan Manajemen Pembiayaan di Madrasah Diniyah selalu membuat perencanaan, pelaksanaan, Pertanggung jawaban atau pelaporan yang disampaikan kepada pengelola madrasah dan wali murid. Dan dikelola secara transparan apa adanya tidak melakukan penyimpangan. Pemasukan dan pengeluaran keuangan selalu dibukukan dan juga dilaporkan kepada Kepala Madrasah Diniyah, Pengelola Madrasah Diniyah dan wali murid. Jadi untuk lancarnya kegiatan belajar mengajar dan kelengkapan sarana prasarana Madrasah Diniyah mengandalkan iuran dari para santri, masyarakat atau donatur dan pemerintah. Sedangkan untuk pertanggungjawaban atau pelaporan di madrasah diniyah bahrul muttaqin sudah dibuat pembukuan dan pelaporan secara transparan tetapi belum sesuai antara perencanaan yang dibuat dengan biaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Rencana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atau pelaporan sudah dibuat dengan baik tapi dalam realisasinya masih terkendala pemasukan dana yang bersumber hanya dari iuran para santri, masyarakat atau donatur dan juga pemerintah.

Berdasarkan tolak ukur pada uraian latar belakang masalah di atas untuk mengetahui Manajemen Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam di Madrasah

Diniyah Se-Kabupaten Bandung, maka identifikasi masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan anggaran (*budgeting*), perencanaan pembiayaan sudah disusun dengan baik namun belum semua terealisasi karena keterbatasan dana.
- 2) Pembukuan (*accounting*), Pelaksanaan Pembiayaan sudah disusun tetapi dalam Pelaksanaannya masih terkendala pendanaan dari Iuran Santri, Masyarakat atau donatur dan pemerintah.
- 3) Pemeriksaan (*controlling*), pertanggungjawaban atau Pelaporan sudah transparan tetapi belum sesuai antara perencanaan yang dibuat dengan biaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas tersebut penelitian ini di batasi pada “penyusunan Anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan (*controlling*)” Pembiayaan di Madrasah Diniyah se-Kabupaten Bandung 2020.

Letak Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah/madrasah, sedangkan perbedaan fokus penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah terletak pada hubungan yang dipengaruhi oleh manajemen pembiayaan. dan objek yang ditelitinya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, untuk mengetahui lebih dalam tentang manajemen pembiayaan diniyah, di Kabupaten Bandung oleh karena itu penelitian ini berjudul “Hubungan Manajemen Pembiayaan dengan Mutu Pendidikan Diniyah (Penelitian di Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah Se-Kabupaten Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan melalui beberapa pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimana Manajemen Pembiayaan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah Se-Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Mutu Pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah Se-Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Hubungan antara Manajemen Pembiayaan dan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah Se-Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Pembiayaan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah Kabupaten Bandung.
2. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Mutu Pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah Kabupaten Bandung.
3. Untuk menguji hipotesis antara Hubungan Manajemen Pembiayaan Di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah dengan mutu pendidika Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dalam praktis dan teoritis.

Manfaat penelitian secara praktis dan teoretis dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai bahan kajian dan bahan penelitian pendidikan serta, dapat memberikan suatu *khazanah* keilmuan tentang “Hubungan Manajemen Pembiayaan dengan Mutu Pendidikan Diniyah”

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Madrasah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi madrasah untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran mengenai Hubungan Manajemen Pembiayaan dengan Mutu Pendidikan Diniyah.
- b. Bagi jurusan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan akan pentingnya Hubungan Manajemen Pembiayaan dengan Mutu Pendidikan Diniyah.

- c. Bagi Peneliti, dan peneliti selanjutnya, penelitian ini memberikan wawasan tambahan bagi peneliti untuk mengetahui Hubungan Manajemen Pembiayaan dengan Mutu Pendidikan Diniyah.

E. Kerangka Berpikir

Manajemen pembiayaan merupakan pengelolaan semua sumber dana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

1) Variable X (manajemen pembiayaan)

Thomas. H. Jones (2016:22) dalam (Lamatenggo, 2017:24-26) ada 3 komponen utama kajian manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu penyusunan perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*) dan pemeriksaan (*auditing*) akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyusunan/perencanaan anggaran (*budgeting*)

Penyusunan/perencanaan anggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kegiatan penyusunan anggaran (budget) pendidikan merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam lembaga kurun waktu tertentu (Fattah, 2019:13).

b. Pembukuan (*accounting*) /pelaksanaan

Pembukuan (*accounting*) dalam kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama yakni, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan.

c. Pemeriksaan (*auditing*) /pertanggungjawaban

Pemeriksaan (*auditing*) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk melaksanakan audit,

diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur.

2) Variable Y (mutu pendidikan)

Untuk melaksanakan program pendidikan dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau acuan yang terukur dan terarah. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 32 Tahun 2013. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan mencakup delapan kriteria yang wajib terpenuhi dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. Delapan standar nasional tersebut terdiri dari:

1) Standar Isi

Standar Isi merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan juga kalender akademik. Indikator daripada standar isi diantaranya: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur.

2) Standar Proses

Standar kedua berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan. Indikator daripada standar proses diantaranya: Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan, proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat dan Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran

3) Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang sekolah dasar, SKL tersebut bertujuan untuk meletakkan dasar

kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya. Indikator daripada standar kompetensi lulusan diantaranya: Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan, sikap dan keterampilan.

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar nasional lainnya di bidang pendidikan berkaitan dengan para pendidik dan tenaga kependidikan. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan. Kualifikasi akademik S1 dan 4 macam kompetensi yang wajib dikuasai guru adalah beberapa poin yang mungkin sudah anda kenal terkait dengan standar nasional ini. Indikator daripada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diantaranya: Ketersediaan dan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan.

5) Standar Sarana dan Prasarana

Patokan ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran, misalnya ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya. Indikator daripada standar sarana dan prasarana diantaranya: Kapasitas daya tampung sekolah memadai, Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak dan Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak.

6) Standar Pengelolaan

Standar keenam yang diatur dalam peraturan pemerintah adalah berkaitan dengan pengelolaan. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien, pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi hingga pengelolaan tingkat nasional. Indikator daripada standar pengelolaan diantaranya: Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan, program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan dan Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan

7) Standar Pembiayaan

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan perlu diatur berdasarkan standar tertentu. Standar Pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun satu tahun. Standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Indikator daripada standar pembiayaan diantaranya : sekolah memberikan layanan subsidi

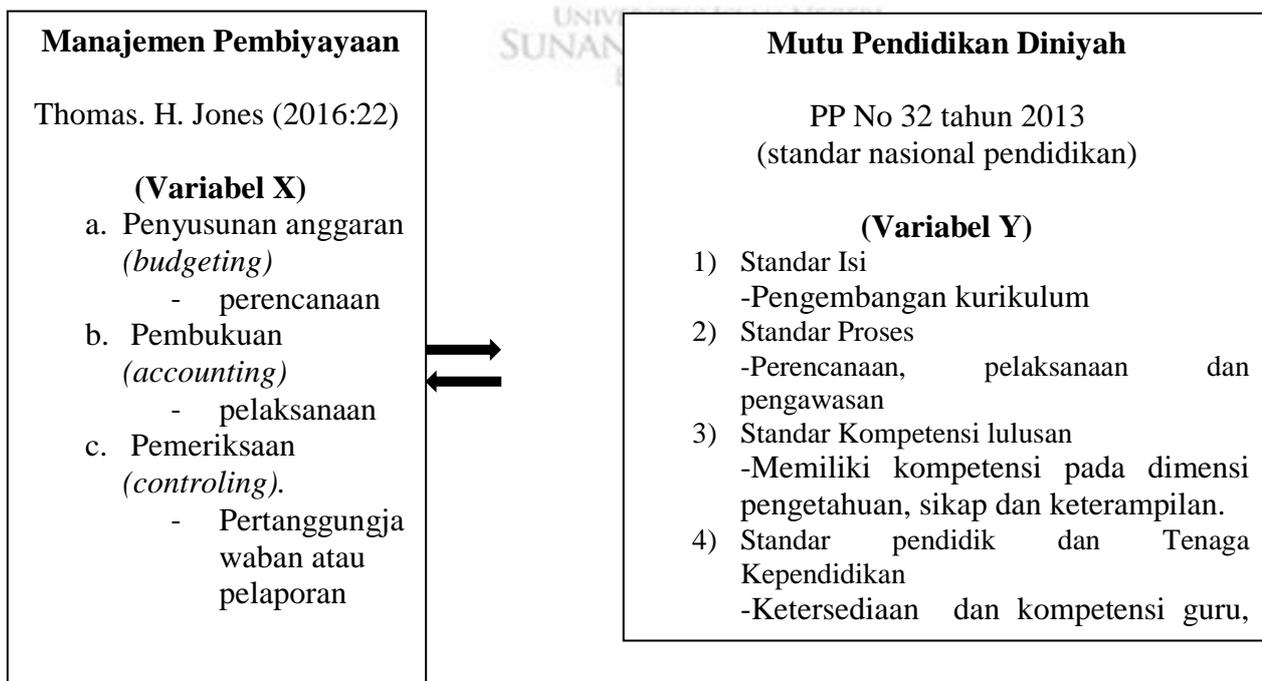
silang, beban operasional sekolah sesuai ketentuan dan sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik.

8) Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian pendidikan terdiri dari: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan (sekolah), dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Indikator dari standar penilaian diantaranya: Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi, teknik penilaian obyektif dan akuntabel, penilaian pendidikan ditindaklanjuti, Instrumen penilaian menyesuaikan aspek, dan penilaian dilakukan mengikuti prosedur.

Dengan demikian, dapat disusun kerangka berpikir keterkaitan antara Hubungan Manajemen Pembiayaan Dengan Mutu Pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hubungan Manajemen Pembiayaan dan Mutu Pendidikan



Keterangan:

X = Variabel Manajemen Pembiayaan

Y = Variabel Mutu Pendidikan Diniyah

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti, yang masih harus diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah, sehingga hipotesis akan dinyatakan ditolak atau diterima.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan atau pengaruh yang positif dan signifikan pada *Hubungan Manajemen Pembiayaan Dengan Mutu Pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Bandung*. Hipotesis penelitian tersebut dapat disusun menjadi H_0 dan H_1 sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara *Manajemen Pembiayaan dan Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Bandung*.

H_1 = Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara *Manajemen Pembiayaan dan Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Bandung*.

G. Kajian Pustaka dan Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Kurniady, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu di Sekolah SMP Pada sub-rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat”, 2016) Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu di Sekolah SMP Pada sub-rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat”, Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang cukup kuat antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan mutu sekolah. Secara individual, hubungan manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap mutu sekolah. Sedangkan kontribusi manajemen pembiayaan pendidikan yang secara langsung mempengaruhi mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat sebesar 24.5%, dimana terdapat 75.5% sisanya merupakan pengaruh dari factor lainnya. Dalam hal tersebut, pada tahap pelaksanaan pembiayaan sudah mencapai kategori sangat tinggi, dimana setiap kegiatan manajemen pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan yang disusun sebelumnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Masditou, 2017) dari POLTEKPAR Medan. Hasil penelitiannya penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan kepala pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran

pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing. Dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rezky Fahman Ramadhani (2017) dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap kualitas pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan. Karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pembiayaan pendidikan lebih besar dari 0,05. Variabel pembiayaan pendidikan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,664.
4. Kemudian jurnal yang diteliti oleh Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady (2016) Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu di Sekolah SMP Pada sub-rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat”, Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang cukup kuat antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan mutu sekolah. Secara individual, hubungan manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap mutu sekolah. Sedangkan kontribusi manajemen pembiayaan pendidikan yang secara langsung mempengaruhi mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat sebesar 24.5%, dimana terdapat 75.5% sisanya merupakan pengaruh dari factor lainnya. Dalam hal tersebut, pada tahap pelaksanaan pembiayaan sudah mencapai kategori sangat tinggi, dimana setiap kegiatan manajemen pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan yang disusun sebelumnya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Masditou “ (2017)”. dari POLTEKPAR Medan dengan judul penelitian Hasil penelitiannya penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan kepala pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan.

Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing. Dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Rahmawati dan Kardoyo (2018) dari Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Komite, dan Integritas Sekolah Terhadap Mutu Lulusan Melalui Mutu Proses”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mutu proses berpengaruh terhadap mutu lulusan sebesar 36,42%. (2) pembiayaan tidak berpengaruh terhadap mutu lulusan, pembiayaan pendidikan berpengaruh mutu proses sebesar 10,11% mutu proses memediasi penuh pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap mutu lulusan sebesar 19,1%. (3) Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap mutu lulusan sebesar 25,2%, kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap mutu proses sebesar 19,62%, mutu proses memediasi parsial pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan sebesar 51,9%. (4) peran komite sekolah tidak berpengaruh terhadap mutu lulusan, peran komite sekolah berpengaruh terhadap mutu proses sebesar 7,78%, mutu proses tidak memediasi pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu lulusan. (5) integritas sekolah tidak berpengaruh terhadap mutu lulusan, integritas sekolah terhadap mutu proses sebesar 4,93%, mutu proses memediasi secara penuh pengaruh integritas sekolah terhadap mutu lulusan sebesar 13,7%.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Manoto Tagatorop (2017) dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul “Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah SMA Swasta”. Hasil penelitian menunjukkan hasil analisis koefisien korelasi antar variabel dengan menggunakan Rumus Product Moment bahwa korelasi antara biaya pendidikan dengan mutu sekolah sebesar 0,491. Uji signifikansi koefisien bahwa korelasi antar variabel sebesar $4,40 t_{tabel}$ pada taraf signifikansi (0,05) dengan $dk = n - 2$ sebesar 2.00. dari hasil perhitungan diperoleh $t_{hitung} 4.40 > t_{tabel} 2.20$, maka koefisien korelasi sangat signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif antara variabel biaya pendidikan terhadap mutu sekolah.